

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA KAMPUNG TENGAH DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA



Oleh:

ROSA LINDA
175310756

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kampung Tengah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi keuangan pada Kampung Tengah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung kepada Kaur Keuangan dan Kaur Umum berupa wawancara lisan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berupa laporan keuangan desa, struktur desa, dan dokumentasi foto kantor. Data Sekunder yaitu data secara tidak langsung yang diperoleh dari pihak ke tiga. Data yang dibutuhkan yaitu berupa Laporan Kekayaan Milik Desa yang dipegang Kaur Umum dan literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang di gunakan yaitu Metode Deskriptif.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Kampung Tengah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura menunjukkan bahwa desa tidak memposting akun yang ada ke dalam buku besar, tidak membuat neraca saldo, tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap dan tidak mengakumulasikan penyusutan aset tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, serta terdapat kekeliruan penyajian pada bagian aset lancar dan aset tetap. Penerapan akuntansi yang dilakukan pada Kampung Tengah belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Kata Kunci: Penerapan Akuntansi Keuangan Desa. Prinsip akuntansi Berterima Umum.

ABSTRACT

This research was conducted in Kampung Tengah village in Mempura District, Siak Sri Indrapura Regency. The purpose of this study is to find out how the application of financial accounting in Kampung Tengah in mempura district, Siak Sri Indrapura regency with Generally Accepted Accounting Principles (PABU).

The types of data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the head of finance and head of general affairs in the form of oral interviews to obtain the information needed in the form of village financial reports, village structures, and office photo documentation. Secondary data is data indirectly obtained from third parties. The data needed isn't the form of a village owned wealth report held by the general finance and literature. Data collection techniques used in this study using interviews and documentation. While the data analysis technique used is the descriptive method.

The results of research conducted in Kampung Tengah village in Mempura District, Siak Sri Indrapura Regency, showed that the village didn't post existing accounts to the ledger, didn't make a trial balance, didn't depreciate fixed assets and didn't accumulate depreciation on fixed assets in the wealth report. Owned by the village, and there are errors or misstatements in the current assets and fixed assets sections. The application of accounting carried out in the Kampung Tengah village or village is not in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (PABU).

Keywords: *Application of Village Financial Accounting, Generally Accepted Accounting Principles.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA KAMPUNG TENGAH DI KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA**”, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCI selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE, MM. CRBC sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA sebagai ketua program studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak H. Burhanuddin, SE., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, perhatian dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar dan seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam memenuhi penelitian ini.
6. Terima Kasih kepada Penguji Seminar proposal dan Seminar Hasil yang telah banyak memberikan dukungan kepada saya.
7. Terkhususnya kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Alex Sandra dan Ibu Hayatun yang selalu mendukung kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima Kasih Juga Kepada Keluarga besar saya yang telah membantu selama proses penelitian ini khususnya kepada Paman, Ante, Ucu, Maktok, adik, dan serta keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Khususnya, kepada pihak Desa Kampung Tengah yang telah memberikan penelitian ini kepada penulis terutama kepada Penghulu Kampung Tengah periode 2018-2019, Ibu Desi Apriani selaku Kaur Keuangan, Yuli Astika selaku Kaur Umum, serta petugas desa yang selalu memberikan pelayanan dan bantuan dalam mengambil laporan keuangan desa dan data lainnya serta informasi dalam penelitian ini.
10. Terima Kasih kepada sahabat dan teman yang telah membantu dan mendukung dalam menyusun penelitian ini yaitu kepada Jihan Melsyaputri, Nabila Tyas Garini, Riza Elsanda, Pazri Annisa, Winia Aulia Rahman, Esa Rafflesia, 8 khayalan, Zakiyaturrahmah, Serina Anggraini, Fani Julia Anggraini, Jamila Sari, Cuncun Rahmawati, dan Anak Kos Radyma.

11. Terima Kasih kepada teman kampus yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan dengan baik.

Akhir kata, Alhamdulillahirobbil alamin semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Pekanbaru,

2021

Rosa Linda



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	X
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	9
2.1 Telaah Pustaka	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi	9
2.1.2 Pengertian Desa	10
2.1.3 Pengertian Akuntansi Desa	10
2.1.4 Prinsip-prinsip Akuntansi	11
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa	12
2.1.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	15
2.1.7 Sistem Pencatatan	16
2.1.8 Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa	17
2.1.9 Siklus Akuntansi Keuangan Desa	18
2.2 Hipotesis	27
BAB III: METODE PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Objek Penelitian	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Teknik Analisis Data	29

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
4.1.1 Sejarah Singkat Kampung Kampung Tengah	30
4.1.2 Geografis Kampung Kampung Tengah.....	31
4.1.3 Demografi Kampung Kampung Tengah	32
4.1.4 Keadaan Ekonomi	34
4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Kampung Tengah	35
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	37
4.2.1 Sistem dan Dasar Pencatatan Akuntansi	37
4.2.2 Proses Akuntansi Kampung Kampung Tengah.....	38
BAB V: SIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Simpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Format Buku Kas Umum	18
Tabel 2.2	Format Buku Kas Pembantu Pajak	19
Tabel 2.3	Format Buku Bank Desa	19
Tabel 2.4	Format Buku Kas Pembantu Kegiatan	20
Tabel 2.5	Format Buku Besar	21
Tabel 2.6	Format Buku Besar Pembantu	22
Tabel 2.7	Format Neraca Saldo	22
Tabel 2.8	Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	24
Tabel 2.9	Format Laporan Kekayaan Milik Desa	25
Tabel 4.1	Daftar Kepala Kampung Kampung Tengah.....	31
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan dan Tidak Tamat Sekolah	34
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana Kampung.....	34
Tabel 4.4	Buku Kas Umum Pemerintah Kampung Kampung Tengah Tahun Anggaran 2019	35
Tabel 4.5	Buku Bank Desa Pemerintah Kampung Kampung Tengah Tahun Anggaran 2019	36
Tabel 4.6	Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Kampung Kampung Tengah Tahun Anggaran 2019	37
Tabel 4.7	Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Kampung Kampung Tengah Tahun Anggaran 2019	38
Tabel 4.8	Buku Besar	39
Tabel 4.9	Buku Besar	39
Tabel 4.10	Buku Besar	40
Tabel 4.11	Buku Besar	40
Tabel 4.12	Neraca Saldo Tahun Anggaran 2018	42
Tabel 4.13	Persediaan 2018 dan 2019.....	47
Tabel 4.14	Pehitungan Penyusutan Tahun 2018 dan 2019	47
Tabel 4.15	Laporan Kekayaan Milik Desa Pemerintah Kampung Kampung Tengah Sampai dengan 31 Desember 2019	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kampung/Desa Kampung Tengah
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura 32



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran 2 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- Lampiran 3 Buku Kas Umum
- Lampiran 4 Buku Bank Desa
- Lampiran 5 Buku Kas Pembantu Pajak
- Lampiran 6 Buku Kas Pembantu Kegiatan
- Lampiran 7 Dokumentasi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Melihat potensi perekonomian desa sangatlah berperan penting untuk menghasilkan sumber dana atau penghasilan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dari aparat atau pejabat desa tetapi masyarakat desa juga berkontribusi dalam membangun desanya. Tanpa kontribusi masyarakat desa, maka tidak akan berkembang untuk meningkatkan kualitas di desa tersebut. Upaya dalam menghasilkan kualitas desa salah satunya dengan menghasilkan potensi wilayah desa. Hal ini dapat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomiannya, menciptakan lapangan kerja, ciri khas desa, membangunkan perkembangan kewirausahaan lokal, dan mendorong peningkatan pendapatan asli desanya.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul yang harus dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut diatur dan mengurus desanya yang dimana bisa memberikan peluang kepada daerah untuk merubah nama desa sesuai dengan karakteristik budaya yang tumbuh didaerahnya.

Berdasarkan regulasi tentang desa diatas, khususnya di Kabupaten Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Kabupaten yang cepat

mengimplementasikannya, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan nama Desa menjadi Kampung. Dalam perubahan Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa Kampung sebutan lain dari Desa artinya Kampung itu sama dengan desa. Hal tersebut bertujuan untuk melestarikan kembali nama dimasa lalu.

Upaya desa dalam pengelolaan keuangannya dapat dilaksanakan melalui dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Hal ini digunakan untuk mengatur pengelolaan keuangan desa. Dalam menjalankan pengelolaan sumber pendapatan desa harus berdasarkan Anggaran Pendapatan Desa.

Sumber Anggaran Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain- lain. Dalam Pendapatan Asli Desa meliputi dari Hasil Usaha Desa, Hasil BUMdes, dan Lain-lain Pendapatan Asli Desa. Selanjutnya, Pendapat Transfer meliputi dari Dana Desa, Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Kampung (ADD), dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berasal dari program pemerintah yang dititipkan ke desa. Sedangkan Pendapatan Lain-lain terdiri atas bunga bank dan pendapatan desa yang sah.

Pendapatan desa tersebut berasal dari dana desa yang didalam pengelolaanya dilakukan dalam keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dalam disiplin anggaran agar menjalankan tata

kelola yang efektif dan efisien. Laporan Keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh desa meliputi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Buku Pajak, Buku Bank Desa, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Hal tersebut dapat dipahami dari pedoman siklus akuntansi untuk mengerjakan laporan tersebut.

Menurut Warren et al., (2017:175) siklus akuntansi merupakan proses dari akuntansi yang dimulai dengan menganalisis transaksi dan menjurnal lalu posting ke buku besar dan diakhiri dengan neraca saldo setelah penutupan.

Menurut IAI-KASP (2015) siklus akuntansi adalah proses akuntansi dimulai dari tahap pencatatan yaitu berupa bukti transaksi yang dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai. Kemudian tahap penggolongan merupakan bukti transaksi yang sudah dikelompokkan posting ke buku besar kemudian dikelompokkan sesuai dengan berdasarkan klasifikasi nama akun, saldo, dan debit atau kredit. Selanjutnya tahap pengikhtisaran yaitu tahap pembuatan neraca saldo dan kertas kerja (*worksheet*). Kemudian tahap keempat adalah tahap pelaporan yaitu berupa siklus akuntansi yang berakhir dengan laporan keuangan yaitu laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

Desa Kampung Tengah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura. dalam menyusun laporan keuangan Kampung Tengah berpedoman pada UU. No.6 Pada Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Daerah UU No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan

Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada Tahun 2018 Kampung Tengah menerima Dana Desa sebesar Rp 714.996.000 dan pada Tahun 2019 sebesar Rp 814.433.000. Dilihat dari tahun 2018 dan 2019 dana desa yang diterima mengalami kenaikan sebesar Rp 99.437.000. Dana desa yang diterima tersebut digunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, bidang pemerdayaan masyarakat ditambah dengan BUMDes dan bidang pembangunan desa. Dana desa tersebut digunakan untuk keperluan desa.

Desa Kampung Tengah melakukan dasar pencatatannya menggunakan basis kas (*Cash Basis*), yaitu dicatat saat terjadinya pemasukan atau pengeluaran. Sedangkan pendapatan diakui saat uang sudah diterima dan beban diakui saat terjadinya kas yang dikeluarkan untuk membayar beban tersebut.

Desa Kampung Tengah melakukan penyusunan pelaporan keuangan desa berdasarkan permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu kepala desa menyusun laporan APBDesa yang akan disampaikan kepada Bupati Siak, melalui dari camat setiap akhir tahun anggaran. Penyusunan laporan keuangan desa menggunakan sebuah sistem yang dinamakan SISKUEDES (Sistem Keuangan Desa) secara terkomputerisasi yang di lakukan dari mencatat aset desa yang digunakan untuk pembukuan awal, lalu desa melakukan penyesuaian saldo aset digunakan sebagai penyesuain laporan di laporan APBDesa. Laporan yang terdapat Desa Kampung tengah semuanya melakukan atau menggunakan Sistem Keuangan Desa kecuali

pada laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018 dan 2019 menggunakan aplikasi *software Microsoft Exel*.

Adapun proses akuntansi Desa Kampung Tengah Kecamatan Mempura di mulai dari Buku Kas Umum-Tunai (Lampiran 3) disertai bukti transaksi berupa kwitansi dan nota. Selanjutnya Buku Pembantu Pajak (Lampiran 5) digunakan untuk merekapitulasi keuangan pajak. Kemudian desa juga menyajikan Buku Bank (Lampiran 4) digunakan untuk merakap uang masuk dan keluar keuangan, sedangkan Buku Pembantu Kegiatan (Lampiran 6) digunakan untuk penjelasan lebih rinci.

Setelah melakukan pencatatan lebih detail, Desa Kampung Tengah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lampiran 2) yang digunakan untuk mencatat pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan untuk melihat sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran pada akhir periode. Kemudian Desa Kampung Tengah membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) yang dimana menyajikan aset desa meliputi aset lancar dan aset tidak lancar, serta Kewajiban desa untuk per 31 Desember tahun 2018 dan 2019.

Berdasarkan dari tahapan akuntansi pada Desa Kampung Tengah ditemukan permasalahan pada tahap siklus akuntansi yaitu Desa Kampung Tengah tidak membuat buku besar pada tahap penggolongan dan neraca saldo dan kertas kerja pada tahap pengikhtisaran.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Kampung Tengah terdapat permasalahan yaitu bagian aset tetap untuk tahun 2018 sebesar Rp950.035.750

tidak ditambahkan dengan aset tetap tahun 2019 sebesar Rp986.378.374 (Lampiran 1), dan desa tidak menyajikan penyusutan aset tetap. Hal tersebut dikarenakan desa Kampung Tengah tidak menghitung akumulasi penyusutan aset tetap seperti jalan, instalasi, dan jaringan.

Selanjutnya, Desa Kampung Tengah pada laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa ada perhitungan atau nilai sisa persediaannya, sedangkan pada laporan kekayaan milik desa (Lampiran 1) diakhir periode desa Kampung Tengah tidak menyajikan persediaan yang bernilai Rp0 yang masih tersisa.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa terdapat kekeliruan penyajian pada golongan persediaan yaitu deposito dan giro, seharusnya penyajian tersebut tidak masuk ke golongan persediaan.

Selain itu, penyajian aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) disajikan seperti penyajian perolehan aset tetap di Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan pada Kampung Tengah Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah kesesuaian penerapan akuntansi keuangan pada Kampung Tengah Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi keuangan pada Kampung Tengah Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi serta proses penyajian laporan keuangan pada Kampung Tengah.
2. Bagi instansi penelitian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan masukan untuk sebagai acuan dalam perbaikan pada Kampung Tengah.
3. Bagi penulis lainnya, dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi pada penelitian yang sejenis kemudian diperbandingkan terhadap materi penelitian yang sama agar penelitian ini bisa lebih sempurna.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini memaparkan berbagai sumber pustaka, landasan teori serta hipotesis yang berhubungan dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai desa, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, kemudian penulis memberikan saran untuk perbaikan di kampung tersebut .

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah sebuah kegiatan yang menghasilkan informasi keuangan berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan kepada pihak yang berkepentingan serta bertujuan untuk menyajikan laporan terhadap kondisi suatu instansi dan situasi aktivitas ekonomi yang terjadi (Warren et al., 2017:3).

Ada beberapa defenisi akuntansi (Alam, 2016:3) adalah:

a. Menurut *Accounting Principles*

“Accounting is a processes of three activities : identifying, recording, and communicating the economic events of an organization (business or non business) to interested user of the information”. (Akuntansi adalah proses dari tiga kegiatan, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi dari suatu organisasi (dagang dan nondagang) kepada pengguna informasi tersebut).

b. Menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau *American Accountning Association* (AAA)

“Accounting is the processes of identifying, measuring, and reporting economic information, which enable celar and unambiguous evaluation and decision-making by those who use the information”. (Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya).

Akuntansi adalah berupa informasi yang berasal dari aktivitas jasa untuk memberikan informasi seperti hasil kinerja perusahaan dan posisi keuangan, dimana tujuannya sebagai dalam pengambilan keputusan dari berbagai pilihan alternatif yang ada (Hery, 2012:1).

Menurut Priharta et al (2018:7) ada delapan macam bidang akuntansi:

1. Akuntansi keuangan (*Financial Accounting*), yang merupakan bidang akuntansi yang kegiatannya utamanya dimulai dengan transaksi, kemudian menyusun laporan keuangan secara perperiode.
2. Akuntansi biaya (*Cost Accounting*), yang merupakan bidang akuntansi yang kegiatannya dimulai dengan mencatat, menganalisis, menyimpulkan, dan mengikhtisarkan terhap biaya produksi serta sebagai pengawasan biaya dalam perusahaan.
3. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*), meliputi bidang akuntansi yang kegiatannya adalah memeriksa secara independen atas pekerjaan-pekerjaan akuntansi secara menyeluruh serta menilai, dan memberikan pendapat dalam laporan keuangan.
4. Akuntansi manajemen (*Management Accounting*), bidang akuntansi yang menyiapkan taksiran untuk membantu manajemen serta sebagai penyediaan data akuntansi bagi penyediaan manajemen.
5. Akuntansi Perpajakan (*Taxation*), bidang akuntansi yang meliputi persiapan untuk pelaporan pembayaran pajak.
6. Sistem Akuntansi (*Accounting System*), bidang akuntansi yang berkaitan dengan penerapan aplikasi dari suatu sistem serta mengarahkan prosedur pengumpulan dan pelaporan data keuangan.
7. Akuntansi Budget (*Budgeting*), bidang akuntansi yang menyajikan rencana keuangan terhadap kegiatan perusahaan dalam suatu periode.
8. Akuntansi Pemerintahan (*Governmental Accounting*), bidang akuntansi yang menyediakan penyajian pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.1.2 Pengertian Desa

Menurut Bastian, (2015:6) menyatakan bahwa desa adalah:

Desa atau udik menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga.

Kesatuan masyarakat yang memiliki hak dalam mengurus rumah tangganya berdasarkan adat istiadat dan hak asal usul yang diakui dalam keberadaan di Daerahnya (Sululing, 2018:1).

2.1.3 Pengertian Akuntansi Desa

Menurut Agustina, (2019:26) mengemukakan bahwa akuntansi desa adalah:

Pencatatan dari seluruh proses transaksi di desa yang dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga dapat digunakan oleh para *stakeholders* untuk memantau dan mengawasi keuangan desa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi desa adalah suatu rancangan dari proses pencatatan transaksi akuntansi yang dimulai dengan bukti transaksi dan nota-nota yang dapat disajikan dalam bentuk pelaporan keuangan desa yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan seperti masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi adalah standar yang menjadikan panutan dari nilai-nilai dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Prinsip tersebut digunakan untuk mematuhi aturan dalam pembuatan laporan keuangan secara efektif dan efisien, sehingga memudahkan pihak yang membuat pelaporan keuangan dan pihak eksternal mudah memahami dan bisa untuk melihat perbandingan dengan laporan keuangan pemerintah desa lain.

Menurut Kusmayadi & Harti, (2018:170) ada lima prinsip akuntansi yang bisa digunakan yaitu:

- a. **Prinsip harga perolehan**, artinya kesesuaian antara kedua belah pihak dalam membuat kesepakatan untuk menentukan harga perolehan dan harga (*asset*). Harga perolehan tersebut harus bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dibayarkan dari kas atau bank.

- b. **Prinsip realisasi pendapatan**, artinya prinsip yang mengukur dan menentukan cara maupun menentukan nilai pendapatan yang diperoleh. Pendapatan tersebut dapat diukur dari bertambahnya harta (*asset*) dan berkurangnya utang atau bertambahnya kas. Pencatatan pendapatan di desa dapat dilihat dari total kas yang diterima pada saat transaksi terjadi.
- c. **Prinsip Objektif**, artinya prinsip yang mengacu pada laporan keuangan desa disertai dengan bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Untuk menghindari kecurangan seperti memanipulasi bukti dan pencatatan, maka diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian pihak internal.
- d. **Prinsip Pengungkapan Penuh**, artinya pembuatan laporan keuangan desa hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- e. **Prinsip Konsistensi**, artinya prinsip yang harus memiliki konsistensi terhadap pembuatan laporan keuangan desa untuk menggunakan metode, pedoman, serta standar pembuatannya. Laporan keuangan desa tersebut harus mempunyai nilai banding, yaitu dapat dibandingkan dengan desa lainnya dengan periode yang sama.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan hak serta kewajiban desa yang dapat dinilai dengan berupa uang atau barang yang berkaitan dengan desanya. Hak dan kewajiban dapat memunculkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi dari perencanaan dan penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap keuangan desanya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang berdasarkan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Pada perencanaan pengelolaan ini berkaitan dengan perencanaan penerimaan dan pengeluaran desa pada tahun yang dianggarkan dalam APBDesa. Struktur APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Selain itu, APBDesa digunakan untuk sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan anggaran, penentuan prioritas pemograman, kegiatan, dan konsistensi terhadap jangka panjang dan pendek sebagaimana yang menjadi visi dan misi di desa. Oleh karena itu, perencanaan itu sangat penting karna tanpa adanya perencanaan maka pengelolaannya tidak berjalan dengan lancar.

Menurut Agustina, (2019:42) mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- a) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa. Selanjutnya, hasil rancangan disampaikan kepada Kepala Desa.
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas lebih lanjut.
- c) Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disepakati selambatnya pada bulan Oktober tahun berjalan, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lainnya selambatnya 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lainnya.
- d) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa selambatnya 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak

memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- e) Jika Kepala Desa dapat melakukan penyempurnaan selambatnya 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- f) Jika Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g) Jika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan oleh Bupati/Walikota dengan keputusan Bupati/Walikota.
- h) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- i) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kas desa baik penerimaan maupun pengeluaran desa yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan di daerahnya, maka pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah/kota. Semua bentuk pengeluaran atau penerimaan harus disertai bukti-bukti atau nota yang lengkap. Buku kas pembantu kegiatan dalam melaksanakan kegiatan desa merupakan dari anggaran belanja desa menyebabkan terjadinya pengeluaran sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan di desa.

3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan keuangan desa berupa rangkaian proses pencatatan dari seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penatausahaan ini merupakan tugas dari pengelolaan keuangan yakni kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi dari bendahara. Bendahara bertugas untuk membayar, menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan semua transaksi yang terjadi. Bendahara desa wajib melaporkan semua transaksi keuangan dalam laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. laporan keuangan yang harus dibuat yaitu berupa Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pajak, dan Buku Bank.

4. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa dan laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa semester akhir. Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan belanja desa disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.

5. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Tugas dari pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, retribusi daerah kabupaten atau kota kepada desa, dan bagi hasil pajak. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota wajib untuk membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan desanya.

2.1.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa tidak saja menjelaskan adanya pengalokasian anggaran yang menyediakan untuk kebutuhan dasar masyarakat desa, akan tetapi mengedepankan asas pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Menurut Agustina, (2019:38) mengungkapkan ada empat asas pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. **Transparan**, merupakan keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui keseluruhan proses tentang keuangan desa secara terbuka.
2. **Akuntabel**, merupakan setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya dapat di pertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berhak atau yang memiliki wewenang untuk meminta keterangan untuk dipertanggungjawabkan.
3. **Partisipatif**, merupakan setiap tindakan yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban diwajibkan melibatkan masyarakat secara luas, para pemangku kepentingan di desa, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuannya untuk mengikat penyelenggaraan di desa serta dapat memberikan atau menyalurkan aspirasinya.
4. **Tertib dan disiplin anggaran**, merupakan anggaran yang dilaksanakan harus konsisten dengan pencatatannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desanya atau sesuai dengan aturan untuk pengelolaan keuangan desanya.

2.1.7 Sistem Pencatatan

Menurut Erlina et al., (2016:4-5) sistem pencatatan yang digunakan ada tiga jenis yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Perbedaan dari sistem pencatatannya pada pembukuan dan akuntansi yaitu dalam penggunaan sistem

pencatatan. Pembukuan itu menggunakan pencatatan *single entry*, sedangkan akuntansi dapat menggunakan *double entry* dan *triple entry*.

a) *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* ini disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Metode *single entry* ini berupa transaksi harian dicatat ke buku kas harian yaitu berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Artinya, jika transaksi menambah jumlah kas yang diterima maka akan diposting kolom penerimaan dan begitu juga sebaliknya, jika transaksi berakibat berkurangnya kas maka posting ke kolom pengeluaran.

b) *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* disebut dengan sistem tata buku berpasangan. Sistem pencatatan *double entry* yaitu berupa penjurnalan dan posting ke kolom sisi debit dan kredit. Dalam melakukan pencatatan transaksi yang terjadi ada dua sisi yang harus seimbang (*balance*) yaitu jumlah sisi debit dan kreditnya.

c) *Triple Entry*

Sistem pencatatan *Triple Entry* pada dasarnya merupakan sistem pencatatan yang menggunakan sistem pencatatan *double entry* ditambah pencatatan pada buku anggaran.

2.1.8 Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang pengakuan dalam akuntansi adalah proses pencatatan yang telah terpenuhinya dalam suatu peristiwa atau kejadian terhadap kriteria pencatatan yang merupakan bagian yang

akan menjadi dalam akuntansi sehingga akan melengkapi unsur Aset (harta), kewajiban (hutang), ekuitas (modal), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja, Laporan Operasional (LO), pembiayaan, dan beban, sebagaimana akan tercantum dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Menurut Erlina et al., (2016:54-55) dasar pengakuan akuntansi adalah sebagai berikut:

a) Basis Kas (*Cash Basis*).

Basis kas ini menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi yang telah terjadi menimbulkan perubahan pada kas. Apakah uang tersebut telah diterima atau dikeluarkan pada saat terjadinya transaksi. Apabila transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut belum bisa diakui.

b) Basis Akrua (*Accrual Basis*).

Basis akrual merupakan dasar pencatatannya diakui pada saat terjadinya transaksi, tanpa melihat apakah kas sudah diterima atau dibayarkan.

c) Basis Kas Modifikasi (*Modified Cash Basis*).

Basis kas modifikasi ini menuntut bendahara mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun berdasarkan atas basis akrual yang telah dimodifikasi.

d) Basis Akrua Modifikasi (*Modified Accrual Basis*).

Basis akrual modifikasi ini transaksi dicatat dengan menggunakan basis kas untuk transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian dari transaksi.

2.1.9 Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Untuk mendapatkan hasil informasi keuangan, maka suatu desa memerlukan beberapa kegiatan proses akuntansi. Proses akuntansi tersebut akan

terjadi secara berulang dan berkesinambungan pada periode akuntansi dimasa yang mendatang. Oleh karena itu, proses akuntansi tersebut dinamakan siklus akuntansi.

Menurut Warren et al., (2017:175) menjelaskan siklus akuntansi proses tahapan akuntansi yang dimulai dengan transaksi, selanjutnya menjurnal dan diakhiri dengan neraca saldo setelah penutupan.

Menurut Agustina, (2019:33) siklus akuntansi merupakan tahapan yang mengenai kegiatan akuntansi yang dilakukan, meliputi dari pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang semuanya berawal dari transaksi keuangan yang terjadi. Adapun tahapan langkah-langkah dalam siklus akuntansi yaitu:

a. Tahap Pencatatan

Tahap pencatatan ini merupakan awal proses dari tahapan siklus akuntansi. Dimulai dengan adanya bukti-bukti yang diperoleh saat transaksi yang terjadi maka akan dilalukan ke dalam buku-buku yang sesuai.

Menurut Priharta et al., (2018:30) “Transaksi merupakan kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan entitas dan merupakan awal proses akuntansi”.

Adapun format untuk pencatatan transaksi pada desa sebagai berikut:

Tabel 2.3
Format Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA
DESA....., KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

Bulan :
Bank Cabang :
No. Rekening :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran		Biaya Administrasi	Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak		
(dalam rupiah)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah Transaksi Bulan Ini									
Jumlah Transaksi Kumulatif									

....., tanggal.....

Mengetahui,
Kepala Desa,

Bendahara Desa,

Sumber: Yuliansyah & Rusmianto

Tabel 2.4
Format Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA....., KECAMATAN....., KAB/KOTA.....
TAHUN ANGGARAN 20XX

Bidang : (contoh: Pembangunan Desa)
Kegiatan : (contoh: Pembangunan Saluran Irigasi)

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengeluaran ke Bendahara	Saldo
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
		Dst.....							
		Jumlah							
		Total Penerimaan			Total Pengeluaran				
						Total Pengeluaran + saldo kas			

....., tanggal..... 20XX

(Nama Terang)

Sumber: IAI-KASP

b. Tahap Penggolongan

Setelah melakukan tahap pencatatan, langkah selanjutnya adalah memindahkan dan mengelompokkan catatan atas bukti transaksi ke dalam buku besar sesuai dengan nama akun yang sejenis beserta saldo yang telah dicatat dan di *postingkan* ke dalam kelompok debit atau kredit. Selain itu, biasanya jika di desa memakai buku kas harian, maka harus membuat rekapitulasi bulanan seperti buku utang dan piutang

Menurut Dianto, (2014:57) mengungkapkan bahwa buku besar merupakan tempat yang digunakan untuk mencatat dari pengelompokan transaksi-transaksi yang dapat mengubah pada akun harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban.

Tabel 2.5
Format Buku Besar

BUKU BESAR

Nama Rekening :

Kode Rekening :

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit (dalam rupiah)	Kredit (dalam rupiah)	Saldo	
					Debit (dalam rupiah)	Kredit (dalam rupiah)
Dst.....						
Total						

Sumber: Yuliansyah & Rusmianto

Tabel 2.6
Format Buku Besar Pembantu

BUKU BESAR PEBANTU

Nama Rekening :

Kode Rekening :

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit (dalam rupiah)	Kredit (dalam rupiah)	Saldo	
					Debit (dalam rupiah)	Kredit (dalam rupiah)
Dst.....						
	Total					

Sumber: Yuliansyah & Rusmianto

c. Tahap Pengikhtisaran

Setelah melakukan pencatatan ke dalam buku besar, langkah selanjutnya adalah melakukan pengikhtisaran ke neraca saldo dan kertas kerja. Tujuan melakukan pencatatan neraca saldo adalah untuk memeriksa jumlah yang telah diposting ke buku besar harus seimbang. Jika ada perbedaan sisi debit dan kreditnya maka kita bisa koreksi kembali. Dengan adanya pembuatan neraca saldo, itu akan mempermudah penyusunan Laporan Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

Menurut Priharta et al., (2018:30) “Neraca adalah laporan yang menggambarkan aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu”.

Menurut Yuliansyah & Rusmianto, (2016) mengungkapkan bahwa neraca saldo merupakan daftar rekening atau ringkasan saldo akhir dari setiap rekening yang ada di buku besar.

Menurut IAI KASP (2015:33) mengungkapkan bahwa pencatatan neraca saldo dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses yang dilakukan dengan benar (sisi debit dan kredit harus seimbang).

Tabel 2.7
Format Neraca Saldo

NERACA SALDO

Kode Akun	Nama Akun	Debit (dalam rupiah)	Kredit (dalam rupiah)
1110	Kas Desa	xxx	xxx
1111	a. Rekening Kas Desa	xxx	xxx
1112	b. Uang Kas Di Bendahara Desa	xxx	xxx
1120	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
1121	a. Deposito	xxx	xxx
1130	Piutang :	xxx	xxx
1131	a. Piutang Sewa Tanah	xxx	xxx
1132	b. Piutang Sewa Gedung	xxx	xxx
1141	Persediaan	xxx	xxx
1141	a. Kertas Segel	xxx	xxx
1142	b. Materai	xxx	xxx
	dll...		

Sumber: IAI-KASP.

d. Tahap Penyajian Laporan Keuangan.

Tahap ini adalah tahap akhir dari siklus akuntansi, IAI-KASP (2015:12) mengemukakan bahwa:

1. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
“Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan suntuk tahun anggaran tertentu”.
2. Laporan Kekayaan Milik Desa
“Laporan ini berisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu”.

Tabel 2.8
Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN.....**

Uraian	Anggaran (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)	Lebih/kurang (dalam rupiah)	Keterangan

I. PENDAPATAN				
D. Pendapatan Asli Desa 4. Pendapatan Asli Desa 5. Swadya, Partisipasi, dan Gotong Royong 6. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah Total				
E. Pendapatan Transfer 6. Dana Desa 7. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 8. Alokasi Dana Desa 9. Bantuan Provinsi 10. Bantuan Kabupaten/Kota Total				
F. Pendapatan Lain-lain 3. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat 4. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah Total				
JUMLAH PENDAPATAN				
II. BELANJA				
F. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 5. Penghasilan Tetap dan Tunjangan - Belanja Pegawai 6. Operasional Perkantoran - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal 7. Operasional BPD - Belanja Barang dan Jasa 8. Operasional RT/RW - Belanja Barang dan Jasa Total				
G. Bidang..... 2. Kegiatan..... - Belanja Barang dan Jasa Total				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/DEFISIT (I-II)				
III. PEMBIAYAAN				
C. Penerimaan Pembiayaan				

4. SILPA 5. Pencairan Dana Cadangan 6. Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
Total				
D. Pengeluaran Pembiayaan 3. Pembentukan Dana Cadangan 4. Penyertaan Modal Desa				
Total				
PEMBIAYAAN NETTO (Penerimaan Pembiayaan- Pengeluaran Pembiayaan)				
SILPA Tahun Berjalan (Selisih antara Surplus/Defisit dengan Pembiayaan Netto)				

Tanggal, 31 Desember 20XX

.....
(Kepala Desa)

Sumber: IAI-KASP

Tabel 2.9
Format Laporan Kekayaan Milik Desa

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
DESA....., KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN...

URAIAN	TAHUN 20XX (Tahun Periode Pelaporan)	Tahun 20XX-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET A. ASET LANCAR 1. Kas Desa a. Rekening Kas Desa b. Uang Kas Dibendahara Desa 2. Investasi Jangka Pendek a. Deposito b. Dst..... 3. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. Dst..... 4. Persediaan		

a. Kertas Segel b. Materai c. Dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa b. Dst..... 2. Aset Tetap a. Tanah b. Peralatan dan Mesin c. Gedung dan Bangunan d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan e. Aset Tetap Lainnya f. Kontruksi Dalam Pengerjaan 3. Dana Cadangan 4. Aset Tidak Lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAL LANCAR		
JUMLAH ASET (A+B)		
II. KEWAJIBAN E. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5. Utang Perhitungan Pihak Ketiga 6. Utang Bunga 7. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 8. Dst.....		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
F. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 3. Pinjaman Jangka Panjang 4. Dst.....		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
JUMLAH KEWAJIBAN (A+B)		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)		

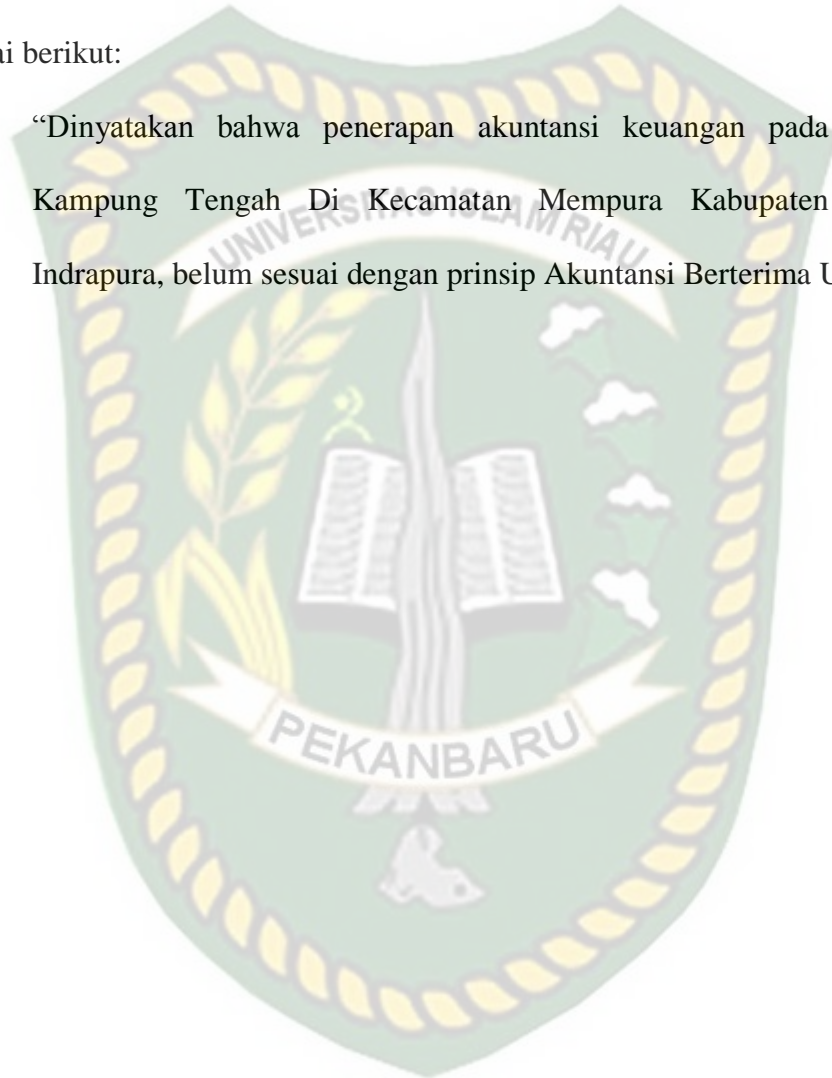
Tanggal, 31 Desember 20XX

.....
(Kepala Desa)

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan, dan telaah pustaka yang telah dijelaskan maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut:

“Dinyatakan bahwa penerapan akuntansi keuangan pada Kampung Kampung Tengah Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura, belum sesuai dengan prinsip Akuntansi Berterima Umum”.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian tersebut dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam penelitian yang diteliti.

3.2 Objek Penelitian

Objek di dalam penelitian ini dilakukan pada Kantor Kampung Kampung Tengah yang berlokasi di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura yang beralamat di Jalan Pemda Kampung Kampung Tengah RT02/RW01.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Untuk menunjang dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang penulis kumpulan merupakan data primer dan data sekunder, adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung kepada kaur keuangan dan kaur umum dari objek penelitian yang berupa wawancara lisan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berupa laporan keuangan desa, struktur desa, dan dokumentasi foto kantor.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data secara tidak langsung yang diperoleh dari pihak ke tiga. Data yang dibutuhkan yaitu berupa laporan kekayaan milik desa yang di pegang oleh kaur umum dan literatur.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data berupa dari wawancara secara langsung kepada kaur keuangan dan Kaur umum untuk mengajukan pertanyaan mengenai segala yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Merupakan mengumpulkan data-data desa berupa laporan keuangan desa berupa *soft copy* dari Kantor Kampung Kampung Tengah Tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisisnya yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Di dalam penelitian ini, teknik yang digunakan berupa data metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, membandingkan, menganalisa, serta menelaah berdasarkan teori yang relevan yang penulis pelajari untuk memecahkan masalah dan kemudian ditarik kesimpulan untuk dijadikan sebuah skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Kampung Tengah

Kampung Tengah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kampung Tengah salah satu tempat yang bersejarah, pada masa penjajahan Belanda tahun 1937 Kampung tengah merupakan Kampung yang paling tertua di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, adapun Nama tersebut pemberian dari salah satu Sultan Kerajaan Siak. Kampung Tengah sudah banyak mengalami kemajuan dan perkembangan dari para pemimpin baik dari jumlah penduduknya maupun dari bidang yang lainnya seperti bidang pembangunan, pendidikan, agama, seni, maupun adat istiadat dan budaya.

Kampung Tengah pada saat ini dipimpin oleh Pejabat penghulu. Kampung Tengah telah di tunjuk untuk menjadi kampung adat oleh Bupati siak terdapat pada Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 dengan harapan Kampung Kampung Tengah dapat menjadi salah satu kampung yang masyarakatnya hidup dan bersosialisasi sesuai dengan adat melayu. Selain itu, pada bidang pembangunan kampung tengah telah berhasil meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan PDTA, PAUD, dan Pustaka Kampung, perbaikan jalan-jalan yang ada di Kampung.

Sebagian masyarakat Kampung Tengah berpenghasilan sebagai petani kebun untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari dan sampai saat ini masyarakat Kampung Tengah masih menjalani hidup gotong royong dalam melakukan

pembersihan lingkungan sehingga dapat mempererat rasa kekeluargaan antar sesama.

Kampung Tengah tentu saja banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Hal tersebut tentunya terdapat dukungan dari masyarakat dan para pemimpin mulai dari penghulu pertama sampai saat ini. Desa Kampung Tengah telah terjadi tujuh belas pergantian penghulu atau kepala kampung yaitu:

Tabel 4.1
Daftar Kepala Kampung/Desa Kampung Tengah

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	Man	1921 – 1928
2	Said	1928 – 1935
3	Makmur	1935 – 1942
4	Ishak	1942 – 1949
5	Mhd. Daud	1949 – 1956
6	Ayang Gafar	1956 – 1958
7	Said Ahmad	1958 – 1965
8	Ayang Gafar	1965 – 1972
9	Amir Nontel	1972 – 1989
10	Syahril Sampul	1989 – 1990
11	Ja'alitudin	1990 – 1992
12	Abd. Munir	1992 – 1993
13	Abd. Munir	1993 – 2005
14	Iskandar	2005 – 2017
15	Syamsurial Bakar, SE. MH	2017 – 2018
16	Drs. Saifullah, MM	2018 – 2019
17	Heri Eko Suprianto, SP, MM	2019 – Sekarang

Sumber: Penghulu Desa Kampung Tengah

4.1.2 Geografis Desa Kampung Tengah

Letak Geografis Kampung Kampung Tengah berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan sungai siak.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayun.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sei Mempura.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Benteng Hulu.

Adapun luas wilayah Kampung Kampung Tengah adalah 10.721 ha dimana Geografi berupa daratan yang bertopografi datar dan 4.160 ha daratan digunakan untuk sebagai lahan perkebunan yang dimanfaatkan untuk penyesuaian iklim kampung, hal ini dapat berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Kampung Kampung Tengah Kecamatan Mempura.

4.1.3 Demografi Desa Kampung Tengah

Penduduk Kampung Kampung Tengah berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Suku Melayu. Sehingga, tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Kampung Kampung Tengah. Hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Kampung Kampung Tengah mempunyai jumlah penduduk 495 jiwa yang terdiri dari laki-laki 249 jiwa, perempuan 246 jiwa dan 141 kepala keluarga yang terbagi dalam dua wilayah dusun.

Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Kampung Tengah sebagai berikut:

Tabel 4.2
TINGKAT PENDIDIKAN

PraSekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana	Tidak/Belum Sekolah
0 Orang	100 Orang	52 Orang	185 Orang	30 Orang	35 Orang

TIDAK TAMAT SEKOLAH

SD	SMP	SMA
29 Orang	25 Orang	39 Orang

Penduduk Kampung Kampung Tengah sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani kebun dan juga penggunaan Tanah di Kampung Kampung Tengah sebagian besar diperuntukkan untuk tanah perkebunan sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Kondisi sarana dan prasarana umum Kampung Kampung Tengah secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	KETERANGAN
1	Gedung Pertemuan	1 Unit	Layakpakai
2	Kantor Kampung	1 Unit	Layakpakai
3	Puskesmas Pembantu	1 Unit	Layakpakai
4	Masjid	1 Unit	Layakpakai
5	Musalla	0 Unit	Layakpakai
6	TK Umum/TK Agama	1 Unit	Layakpakai
7	SD Negeri	1 Unit	Layakpakai
8	SMP Negeri/MTs Swasta	0 Unit	Layakpakai
9	SMA/Madrasah Aliah	0 Unit	Layakpakai
10	MDA	1 Unit	Layakpakai
11	Sungai	0M	
12	Jalan Pemda	0M	
13	Jalan Lingkungan	0M	Layakpakai
14	Lapangan Bola Kaki	0 Ha	
15	Lapangan Bola Volly	1 Unit	Layakpakai
16	Poskesmas/Posyandu	0 Unit	
17	Dermaga	1 Unit	

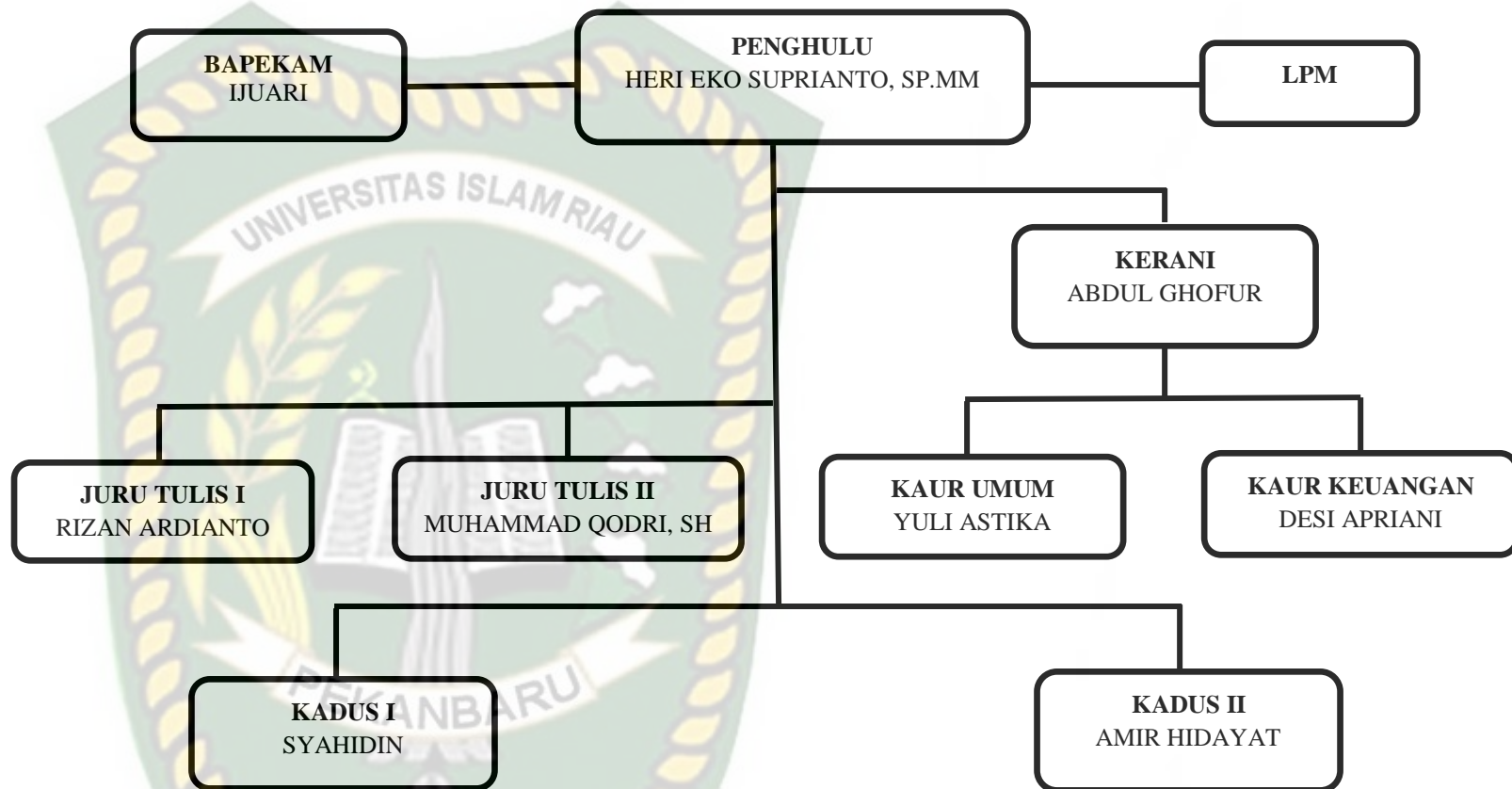
18	Gedung PKK	0 Unit	Tidaklayak
19	Tower	1 Unit	
20	Balai Kesenian	0 Unit	
21	Jembatan (Leghton	2 Unit	
	Dst		

4.1.4 Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Kampung Kampung Tengah bermata pencaharian tidak tetap, sebagian ada beprofesi sebagai nelayan, pedagang, buruh harian, motong kebun karet dan sawit dengan penghasilan rata-rata kurang dari Rp1.000.000 perbulan. Selain sektor non-formal, masyarakat Kampung Kampung Tengah sebagian beprofesi formal yaitu seperti PNS, Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis, dan lain-lain.

4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintah Kampung/Desa Kampung Tengah

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
PEMERRINTAH KAMPUNG/DESA KAMPUNG TENGAH
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA



1. Penghulu atau Kepala Desa.

Kepala desa adalah perangkat kepala kampung atau desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

2. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).

Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi dari pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

3. Kerani atau Sekretaris Kampung.

Sekretaris desa merupakan pegawai yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan bagian pengelolaan administrasi. Ada dua pembantu dalam menjalani tugas:

- a. Juru Tulis 1 adalah Bidang Pemerintahan.
- b. Juru Tulis II adalah Bidang Pembangunan.

4. Kaur Umum atau Kepala Urusan Umum.

Kepala urusan umum atau Kaur Umum bertugas melaksanakan dan menyiapkan administrasi surat menyurat, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa.

5. Kaur Keuangan atau Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan bertugas melaksanakan urusan keuangan seperti mengelola sumber pendapatan desa dan mengelola administrasi keuangan desa.

6. Kadus atau Kepala Dusun

Kepala dusun bertugas pada wilayah dalam kampung yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjabarkan hasil penelitian pada Kampung Kampung Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura. Berdasarkan Permasalahan yang telah dijelaskan pada bab I dan panduan teori di bab II maka akan menjelaskan dan menganalisis tentang akuntansi keuangan yang di terapkan pada Kampung Kampung Tengah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

4.2.1 Sistem dan Dasar Pencatatan Akuntansi

Desa Kampung Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura menggunakan sistem pencatatan Sistem tata buku tunggal (*Single Entry*) yaitu untuk mencatat segala transaksi dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum. Pada metode sistem pencatatan tersebut, sangatlah memengaruhi pada akun kas. Jika transaksi dicatat kolom penerimaan maka, akan menambah akun kas dan sebaliknya akan mengurangi akun kas jika terjadi transaksi pengeluaran kas.

Selain itu, dasar pencatatan transaksi yang terjadi pada Kampung Tengah menggunakan *Cash Basis*. Pengakuan akuntansi dalam transaksi yang telah dicatat, diakui pada saat diterima dana kas dan begitu juga sebaliknya, jika kas digunakan untuk keperluan pembayaran maka akan dicatat pada pengeluaran kas.

4.2.2 Proses Akuntansi Desa Kampung Tengah

Penyusunan laporan keuangan Desa Kampung Tengah dalam mencatat transaksi yaitu menggunakan sistem komputerisasi disebut dengan Sistem Keuangan Desa (*siskuedes*). Kemudian transaksi akan dimasukkan kedalam program sesuai dengan bukti transaksi.

1. Tahap Pencatatan Akuntansi

Tahapan pertama yang dilakukan Desa Kampung Tengah yaitu mencatat transaksi sesuai dengan bukti transaksi. Buku tersebut terdiri dari buku kas umum, buku bank desa, buku kas pembantu pajak, dan buku kas pembantu kegiatan.

a. Buku Kas Umum

Desa Kampung Tengah telah mencatat mengenai segala transaksi pada buku kas umum, kolom penerimaan pada buku kas umum dicatat saat ada penerimaan dan begitu juga sebaliknya pada kolom pengeluaran dicatat saat adanya transaksi mengenai pengeluaran baik itu secara tunai maupun kredit. Berikut ini akan menjelaskan terkait beberapa transaksi yang telah dicatat pada Buku Kas Umum Desa Kampung Tengah:

Tabel 4.4
Buku Kas Umum
Pemerintah Kampung Kampung Tengah
Tahun Anggaran 2019

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (dalam rupiah)	Pengeluaran (dalam rupiah)	Saldo
1	2	4	5	6	9
50	09/04/2019	Pengambilan Tunai dari Dana ADK dan Bantuan Pemerintahan Tahun 2019 Kabupaten Kas dibendahara	207.688.052		207.688.052

51	09/04/2019	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu Kampung Tahun 2019	4.050.000	203.638.052
52	09/04/2019	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung Tahun 2019	42.450.000	161.188.052
53	09/04/2019	Jaminan Sosial Perangkat Kampung 2019	5.460.000	155.728.052
54	09/04/2019	Pembayaran Belanja Operasional Pemerintah Kampung Tahun 2019	50.422.052	105.306.000
55	09/04/2019	Tunjangan Kedudukann BPD	13.100.000	92.206.000
Jumlah				925.754.208

Sumber: Buku Kas Umum Desa Kampung Tengah

Berdasarkan Tabel 4.4 Buku Kas Umum yang digunakan di Desa Kampung Tengah telah sesuai dengan format Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

b. Buku Bank Desa

Selanjutnya adalah Buku Bank Desa yang berguna untuk transaksi yang akan memengaruhi pada saldo Bank. Desa Kampung Tengah sudah mencatat pemasukan ataupun pengeluaran yang berkaitan dengan Bank kedalam Buku Bank Desa. Berikut ini ada beberapa sampel dari transaksi yang terdapat pada Buku Bank Desa Kampung Tengah.

Tabel 4.5
Buku Bank Desa
Pemerintah Kampung Kampung Tengah
Tahun Anggaran 2019

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran	Bunga	Penarikan	Pajak	Biaya	
(dalam rupiah)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	18/12/2019	Alokasi Dana Kampung kurang bayar Tahun 2019	0023/TBP/13.2005/2019	16.521.908					16.521.908
40	18/12/2019	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Tahun 2019	0025/TBP/13.2005/2019	200.000.000					216.521.908
41	19/12/2019	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019	0024/TBP/13.2005/2019	32.999.760					249.521.668
42	20/12/2019	Penarikan Tunai	0016/Bank/13.2005/2019			16.029.000			233.492.668

Sumber Data: Buku Bank Desa Kampung Tengah

Berdasarkan Tabel 4.5 Buku Bank Desa yang digunakan desa Kampung Tengah telah sesuai dengan format Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

c. Buku Kas Pembantu Pajak

Hal ini berkaitan dengan pajak berdasarkan pemotongan ataupun penyetoran atas belanja desa. Desa Kampung Tengah telah melakukan atau melaksanakan pencatatan di dalam Buku Kas Pembantu Pajak. Di bawah ini ada beberapa sebagian transaksi yang dijalankan oleh Desa Kampung Tengah.

Tabel 4.6
Buku Kas Pembantu Pajak
Pemerintah Kampung Kampung Tengah
Tahun Anggaran 2019

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (dalam rupiah)	Penyetoran (dalam rupiah)	Saldo (dalam rupiah)
1	2	3	4	5	6
1	09/04/2019	Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			
		Potongan Pajak PPh 22	96.545		96.545
		Potongan Pajak PPN Pusat	643.636		740.181
2	09/04/2019	Perlengkapan ART dan bahan kebersihan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	194.546		934.727
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	29.182		963.909
3	09/04/2019	penggandaan kepada Aulia Rezeki			
		Potongan Pajak PPN Pusat	279.818		1.243.727
		Potongan Pajak PPH Pasal 22	41.973		1.285.700
4	09/04/2019	Pembelian makan minum harian			
		Pajak Restoran, Rumah makan	1.140.700		2.426.400

Sumber: Buku Kas Pembantu Pajak Desa Kampung Tengah

Berdasarkan Tabel 4.6 Buku Kas Pembantu Pajak yang digunakan Desa Kampung Tengah telah sesuai dengan format Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

d. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku kas pembantu kegiatan digunakan untuk mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kas dengan penjelasan yang lebih rinci sesuai dengan kegiatan dan bidang di Desa Kampung Tengah. Adapun beberapa contoh Buku Kas Pembantu Kegiatan pada Desa Kampung Tengah.

Tabel 4.7
Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Kampung Kampung Tengah
Tahun Anggaran 2019

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengeluaran ke	Saldo
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan	Belanja Modal		
1	09/04/2019	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu Kampung Tahun 2019	4.050.000		0001/SPP/13.2005/2019				4.050.000
2	28/05/2019	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu Kampung Tahun 2019	2.700.000		0024/SPP/13.2005/2019				6.750.000
3	18/06/2019	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu Kampung Tahun 2019	1.350.000		0039/SPP/13.2005/2019				8.100.000
4	19/08/2019	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu Kampung Tahun 2019	2.700.000		0059/SPP/13.2005/2019				10.800.000

Sumber: Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Kampung Tengah

Berdasarkan Tabel 4.7 Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Kampung Tengah telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

2. Tahap Penggolongan

Setelah dilakukan tahap pencatatan pada Buku Kas Umum, selanjutnya adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan yaitu semua bukti transaksi yang di kelompokkan ke dalam buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo yang di catat di sisi debit ataupun kredit. Desa Kampung Tengah ternyata tidak memposting akun yang ada ke dalam buku besar. Hal tersebut, tahapan yang diselenggarakan Desa Kampung Tengah belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Adapun contoh buku besar yang seharusnya diterapkan dan dibuat oleh Desa Kampung Tengah:

Tabel 4.8
Buku Besar

Nama Akun : Kas di Bendahara Desa
No. Akun :

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit (dalam rupiah)	Kredit (dalam rupiah)	Saldo	
					Debit (dalam rupiah)	Kredit (dalam rupiah)
09/04/2019	Pengambilan Tunai dari Dana ADK dan Bantuan Pemerintahan Tahun 2019 Kabupaten Kas dibendahara		207.688.052		207.688.052	
09/04/2019	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu Kampung Tahun 2019			4.050.000	203.638.052	
09/04/2019	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung Tahun 2019			42.450.000	161.188.052	
09/04/2019	Jaminan Sosial Perangkat Kampung 2019			5.460.000	155.728.052	
09/04/2019	Pembayaran Belanja Operasional Pemerintah Kampung Tahun 2019			50.422.052	105.306.000	
09/04/2019	Tunjangan Kedudukann BPD			13.100.000	92.206.000	
Total						

Sumber Data: Data Olahan Penulis 2021.

Tabel 4.9
Buku Besar

Nama Akun : Alokasi Dana Desa
No. Akun :

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit (dalam rupiah)	Kredit (dalam rupiah)	Saldo	
					Debit (dalam rupiah)	Kredit (dalam rupiah)
09/04/2019	Pengambilan Tunai dari Dana ADK dan Bantuan Pemerintahan Tahun 2019 Kabupaten Kas			207.688.052		207.688.052

	dibendahara					
--	-------------	--	--	--	--	--

Sumber Data: Data Olahan Penulis 2021.

Tabel 4.10
Buku Besar

Nama Akun : Belanja Barang dan Jasa

No. Akun :

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit (dalam rupiah)	Kredit (dalam rupiah)	Saldo	
					Debit (dalam rupiah)	Kredit (dalam rupiah)
09/04/2019	Pembayaran Belanja Operasional Pemerintah Kampung Tahun 2019		50.422.052		50.422.052	

Sumber Data: Data Olahan Penulis 2021.

Tabel 4.11
Buku Besar

Nama Akun : Belanja Pegawai

No. Akun :

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit (dalam rupiah)	Kredit (dalam rupiah)	Saldo	
					Debit (dalam rupiah)	Kredit (dalam rupiah)
09/04/2019	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghulu		4.050.000		4.050.000	
09/04/2019	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung		42.450.000		46.500.000	
09/04/2019	Jaminan Sosial Perangkat Kampung		5.460.000		51.960.000	
09/04/2019	Tunjangan Kedudukan BPD		13.100.000		65.060.000	

Sumber Data: Data Olahan Penulis 2021.

3. Tahap Pengikhtisaran.

Setelah membahas tahap pencatatan dan tahap penggolongan, selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran adalah tahapan dari pencatatan saldo akhir buku besar ke neraca saldo. Tujuannya adalah untuk melihat postingan jumlah sisi debit atau kredit telah sama atau tidak (*balance*). Jika ada perbedaan antara sisi debit dan kreditnya, maka kita bisa koreksi kembali. Jika sudah benar neracanya maka akan mempermudah penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Pada tahapan ini, Desa Kampung Tengah belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Berikut ini contoh neraca saldo yang seharusnya dilakukan oleh Desa Kampung Tengah.

a. Neraca Saldo

Setelah diteliti ternyata Desa Kampung Tengah tidak membuat neraca saldo. Seharusnya, Desa Kampung Tengah membuat neraca saldo agar mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Berikut ini contoh format neraca saldo yang seharusnya dilakukan Desa Kampung Tengah:

Tabel 4.12
Neraca Saldo
Tahun Anggaran 2018

	Nama Akun	Debit	Kredit
	Kas Desa		
	a. Uang Kas di Bendahara Kampung.		
	b. Rekening Kas Kampung	74.248.784, 74	
	Aset Tetap		
	a. Tanah		
	b. Peralatan dan Mesin		
	- Mesin Pelet	21.520.000	
	- Kerangka Baleho		
	- Komputer	10.000.000	

	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer 10.000.000 - Printer 3.923.200 - Hardisk Eksternal 1.230.000 - Komputer - Printer - UPS 1200 Watt - Lemari 3.169.800 - Trypot Kamera 1.500.000 - Alat Rebana - Sepeda Motor 24.000.000 - Plank Kampung Sakinah - Plank Kalimat Thayyibah - Papan Struktur - Papan Jadwal Kegiatan - Papan Neraca Keuangan - Papan Tulis Tegak - Jam Jadwal Digital - HT (Handy Talky) 2.550.000 - Parit Rabat Kampung 35.431.450 - Semenisasi Jalan Makam 62.388.800 - Semenisasi Jalan Tenun 82.201.800 - Semenisasi Jalan Datuk Panglima Kumbang 154.916.200 - Box Culvert Jalan Lestari Jernih 102.176.000 - Drainase Jalan Dewa 98.287.750 - Drainase Jalan Manggis 43.382.350 - Drainase Jalan Datuk Panglima Kumbang 81.337.000 - Drainase Jalan Binjai 44.015.250 - Drainase Jalan Pemuda 103.136.650 - Drainase Jalan Manggis II 64.869.500 - Drainase Jl Manggis - Drainase Jl Suak Pekong I - Drainase Jl Suak Pekong II - Drainase Jl Datuk Tanah Datar - Drainase Jl Lestari Jernih - Semenisasi Jalan Dewa - Semenisasi Gg Serumpun - Semenisasi Gg Dewa - Semenisasi Jalan Datuk Panglima Kumbang - Box Culvert Jalan Lestari Jernih - Box Culvert Jalan Lestari Jernih Menuju MI. 		
	c. Jalan, Jaringan dan Instalasi		
1	Pendapatan		
1.1	Lain-lain Pendapatan Asli		1.957.023

1.2	Pendapatan Transfer		
1.2.1	Dana Kampung		714.996.000
1.2.2	Bagi Hasil Pajak		12.060.813
1.2.3	Alokasi Dana Kampung		828.195.731
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi		100.000.000
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten		8.400.000
2	Belanja		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung.		
2.1.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.1.1.01	Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung	133.200.000	
2.1.1.1.02	Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung	52.800.000	
2.1.1.1.03	Tunjangan BAPEKAM	55.200.000	
2.1.1.1.04	Penghasilan staf Perangkat Kampung	28.800.000	
2.1.1.1.05	Penghasilan Pengelola Pustaka Kampung	6.000.000	
2.1.1.1.06	Penghasilan Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan	16.800.000	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung.		
2.2.2	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Kampung.		
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.2.2.2.02	Belanja Honorarium TPK	1.710.000	
2.2.2.2.03	Belanja Honorarium Tenaga Teknis Kontruksi	3.000.000	
2.2.2.2.07	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0	
2.2.2.2.11	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	
2.2.2.3	Belanja Modal		
2.2.2.3.53	Belanja Modal Jalan	297.263.350	
2.3	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan		
2.3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban		
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.3.1.2.12	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000	

2.4	Bidang Pemerdayaan Masyarakat		
2.4.1	Kegiatan Pembinaan dan Operasional TP-PKK		
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.4.1.2.01	Belanja Honorarium Tim/Panitia		
	Belanja Honorarium	1.500.000	
2.4.1.2.04	Penceramah/Narasumber/Tenaga		
	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000	
2.4.1.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan		
2.4.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.445.000	
2.4.1.2.12	Belanja Pakaian dan Atributnya	232.500	
2.4.1.2.13	Belanja Uang Saku dan	5.337.500	
2.4.1.2.24	Transportasi	5.250.000	
	Belanja Dekorasi dan	1.250.000	
2.4.1.2.25	Dokumentasi		
	Belanja Hadiah Kegiatan	900.000	
2.4.1.2.33	Belanja Jasa Upah Tengah Kerja		
2.4.1.2.36	Belanja Barang untuk diberikan	1.700.000	
2.4.1.2.38	Kepada Masyarakat	500.000	
		4.135.000	
3	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		38.954.668

Sumber Data: Data Olahan Penulis Tahun 2021

b. Penyesuaian.

Tahap berikutnya yaitu melakukan penyesuaian terhadap persediaan dan aset tetap di desa. Penyesuaian merupakan sebuah jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan saldo pada akun atau menyajikan nilai, untuk menyesuaikan dengan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Desa Kampung Tengah tidak melakukan penyesuaian. Berikut ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Persediaan

Persediaan merupakan bagian aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan operasional di desa atau perusahaan. Persediaan ini juga seharusnya melakukan penyesuain pada akhir periode.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019 dan 2018 persediaan bersaldo Rp. 0. Dikarenakan Desa Kampung Tengah tidak menghitung persediaan yang tersisa di akhir periode. Setelah di wawancara, ternyata persediaan tersebut telah habis pakai selama kurang dari 1 tahun, sehingga di Laporan Kekayaan Milik Desa bersaldo Rp0.

2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang wujudnya ada yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun. Aset tetap yang digunakan di desa Kampung Tengah seperti Tanah, peralatan dan mesin.

Setelah diteliti oleh penulis, Desa Kampung Tengah (Lampiran 1) tidak melakukan penyusutan aset tetap, disebabkan nilai aset tetap seperti Jalan, jaringan dan instalasi di Laporan tersebut belum dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal tersebut tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya Berikut ini pencatatan jurnal penyesuaian yang seharusnya dibuat oleh Desa Kampung Tengah:

Tabel 4.14
Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019

Tahun 2018	Tahun 2019
Jalan, Jaringan, Instalasi	Gedung, Bangunan dan Taman
Nilai Perolehan : Rp. 299.506.800	Nilai Perolehan : Rp. 62.571.350
Umur Ekonomis : 20 Tahun	Umur Ekonomis : 20 Tahun
Metode Penyusutan : Garis Lurus	Metode Penyusutan : Garis Lurus
Penyusutan Pertahun =	Penyusutan Pertahun =
$\frac{\text{Rp. 299.506.800}}{20 \text{ Tahun}} = \text{Rp. 14.975.340}$	$\frac{\text{Rp. 62.571.350}}{20 \text{ Tahun}} = \text{Rp. 3.128.568}$

Sumber Data: Data Olahan Penulis 2021.

Adjustment:

Tahun 2018 :

Beban Penyusutan Jalan, jaringan, dan Instalasi Rp.14.975.340

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jarinan, dan Instalasi Rp.14.975.340

Tahun 2019 :

Beban Penyusutan Gedung, Bangunan, dan Taman Rp.3.128.568

Akumulasi Penyusutan Gedung, Bangunan, dan Taman Rp.3.128.568

4. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan yang dilakukan Desa Kampung Tengah adalah membuat laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

APBDesa merupakan laporan yang menunjukkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang akan membandingkan dengan anggaran pada periode saat ini dengan periode berikutnya. Desa Kampung Tengah membuat APBdesa sesuai dengan PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) dilihat di lampiran 2.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan desa ini membahas tentang kekayaan bersih desa dalam satu periode. Penyajian dalam laporan kekayaan milik desa ada asset, kewajiban, dan ekuitas. Tujuan membuat laporan ini adalah mempermudah pekerjaan desa dan mengetahui jumlah yang sebenarnya.

Desa Kampung Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura belum sesuai dengan PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum).

Karena, pada Laporan Kekayaan Milik Desa terdapat kekeliruan penyajian pada golongan persediaan yaitu deposito dan giro, seharusnya penyajian tersebut tidak masuk ke golongan persediaan melainkan masuk ke golongan aset lancar yaitu pada investasi jangka pendek.

Selain itu, penyajian aset tetap yang salah pada golongan peralatan dan mesin disajikan seperti penyajian perolehan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dikarenakan jika terdapat belanja modal pada golongan tersebut bukan masuk ke Laporan Kekayaan Milik Desa akan tetapi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Berikut ini format yang seharusnya disajikan pada Desa Kampung Tengah Kabupaten Siak Sri Indrapura:

Tabel 4.15
Laporan Kekayaan Milik Desa
Pemerintah Kampung Kampung Tengah
Sampai dengan 31 Desember 2019

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
ASET		
A. ASET LANCAR		
01 Kas Desa		
a. Uang Kas di Bendahara Kampung		
b. Rekening Kas Desa	327.996.211,74	
02 Investasi Jangka Pendek		
a. Deposito		
b. Giro		
03 Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
04 Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
JUMLAH ASET LANCAR	327.996.211,74	
B. ASET TIDAK LANCAR		
01 Investasi Permanen		
a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa		

02 Aset Tetap a. Gedung, Bangunan, dan Taman b. Akumulasi Gedung, Bangunan, dan Taman 03 Dana Cadangan	62.571.350 (3.128.568)	59.442.782	
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		59.442.782	
JUMLAH ASET (A+B)		387.438.993,74	
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)		387.438.993,74	

Sumber: Data Olahan Penulis 2021



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab IV, maka bab penulis mengambil kesimpulan dan memberikan saran yang berguna kedepannya.

a. Simpulan

1. Desa Kampung Tengah Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem yang terkomputerisasi yaitu aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siekudes), kecuali pada laporan kekayaan milik desa menggunakan *Software* yaitu menggunakan Microsoft Exel. Dasar pencatatan yang digunakan Desa Kampung Tengah adalah Cash Basis.
2. Tahap pencatatan dimulai dari buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu bank, dan buku kas pembantu kegiatan. Pada tahapan ini sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).
3. Pada tahap penggolongan Desa Kampung Tengah tidak mempostingkan akun yang ada ke dalam buku besar, sehingga belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).
4. Pada tahap pengikhtisaran Desa Kampung Tengah tidak membuat neraca saldo dan tidak melakukan penyesuaian terhadap aset tetap kecuali, pada penyesuaian persediaan yang tersisa di akhir periode. Setelah di teliti ternyata persediaan tersebut telah habis pakai selama

kurang dari 1 tahun. Sehingga, di Laporan Kekayaan Milik Desa bersaldo Rp0,-.

5. Terakhir, pada tahap pelaporan. Pada tahapan Laporan Kekayaan Milik Desa terdapat kekeliruan karna penyajian aset lancar seperti deposito dan giro bukan termasuk dari golongan persediaan dan penyajian aset tetap yang salah pada golongan peralatan dan mesin disajikan seperti penyajian perolehan aset tetap di Laporan Realisasi Anggaran (LRA)..

b. Saran

1. Desa Kampung Tengah Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam mengelola keuangan desa diharapkan harus sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum, sehingga Laporan Keuangan yang di buat Desa Kampung Tengah sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Pada tahap penggolongan sebaiknya Desa Kampung Tengah membuat buku besar.
3. Pada tahap pengikhtisaran Desa Kampung Tengah sebaiknya membuat neraca saldo agar mempermudah dalam pembuatan Laporan Keuangan.
4. Seharusnya Desa Kampung Tengah menghitung aset tetap yang dimiliki, dikarenakan nilai aset tetap belum dikurangi dengan akumulasi penyusutan agar kita tau menunjukkan nilai yang sebenarnya.
5. Sebaiknya pada Laporan Kekayaan Milik Desa seperti akun deposito dan giro dihapuskan dari penyajian persediaan. Begitu juga penyajian aset tetap yang salah seperti belanja modal pada penyajian akun peralatan dan mesin itu dihapuskan. Karna, deposito dan giro itu bukan

termasuk golongan persediaan tetapi termasuk aset lancar dan begitu juga belanja modal tidak termasuk kategori Laporan Kekayaan Milik Desa tetapi menunjukkan ke Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

6. Pada penelitian berikutnya, diharap mencari variabel lain yang diteliti dan dapat memberikan saran kepada penelitian sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, K. 2019. *Buku Pintar Akuntansi Desa dan Kelurahan*. Desa Pustaka Indonesia.
- Alkadafi, M., Rusdi, NST, F. R., & April, M. 2019. Kebijakan Penetapan Pemerintah Kampung Adat Di Kabupaten Siak Sri Indrapura. *El-Riyasah, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2019*, 2-3.
- Bastian, I. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa*. Erlangga.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. 2019. Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika - Vol. 03, No.02 (Agustus 2019)*, 288.
- Dianto, I. 2014. *Pengantar Akuntansi 1*. Alaf Riau.
- Erlina, Rambee, O. S., & Rasdianto. 2016. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Accrual*. Salemba Empat.
- Hery. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Bumi Aksara.
- Kusmayadi, & Harti, D. 2018. *Pratikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintahan*. Erlangga.
- Priharta, A., Setiyaningsih, T. A., & Rahayu, D. P. 2018. *Pengantar Akuntansi Berbasis PSAK Terbaru*. Bogor: In Media.
- S, Alam. 2016. *Ekonomi Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMA/MA Kelas XII*.
- Sululing, S. 2018. *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*. CV IRDH.
- Warren, Carl. S., James M.Reeve, Jonathan E. Duchac, Ersa Tri Wahyuni, dan Amir Abadi Jusuf.2017. *Pengantar Akuntansi 1 - Adaptasi Indonesia* (Vol. 4). Salemba Empat .
- Yuliansyah, & Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Kompartemen ASP : Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau